

“Peran Bidang Perumahan dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan di Kabupaten Deli Serdang”

Muhammad Yuda Hendrawan

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: muhammadyudahendrawan@gmail.com

Muhammad Ikhsan Harahap

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id

Abstract. *The Deli Serdang Regency Housing and Settlement Area Service is an agency established by the Deli Serdang Regency Government which has a vision of realizing productive, sustainable, environmentally friendly housing, including through the house renovation assistance program or PRTLH (Uninhabitable House Program) which is regularly held every year. The role of the housing sector in this implementation is to look for valid data on the houses that will be renovated. This program aims to help underprivileged people. Based on the type of research, this is descriptive research with a qualitative approach, where this study focuses on problems/phenomena that existed at the time the research was conducted, which is actual, which then describes the reality clearly and aims to find out in detail about the role of the Housing Sector in the Stimulan Assistance for Self-Help Companies or the House Renovation Program at the Department of Housing and Settlements and Land Affairs of Deli Serdang Regency. The government needs to play a greater role in providing and providing convenience and assistance for housing and residential areas for the community through the implementation of housing and area-based residential areas and community self-sufficiency so that they form a functional unit in the form of physical spatial planning, economic life and socio-culture which is able to guarantee environmental sustainability in line with the spirit of democracy, regional autonomy and openness in the order of social, national and state life.*

Keywords: *Uninhabitable House (PRTLH), house renovation program.*

Abstrak. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai visi terwujudnya pemukiman yang layak produktif, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, diantaranya dengan melalui program bantuan bedah rumah atau PRTLH (Program Rumah Tidak Layak Huni) yang rutin diadakan tiap tahun. Peran bidang perumahan dalam pelaksanaan ini yaitu mencari data valid terhadap rumah yang akan di bedah. Program ini bertujuan, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan jenis penelitiannya ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana studi ini memusatkan perhatian pada masalah/ fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, yang bersifat aktual, yang kemudian digambarkan realita yang jelas dan bertujuan untuk mengetahui secara terperinci tentang bagaimana Peran Bidang Perumahan Dalam Bantuan Stimulan Perusahaan Swadaya atau Program Bedah Rumah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata Kunci: Rumah Tidak Layak Huni(PRTLH), program bedah rumah.

PENDAHULUAN

Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Salah satu yang menjadi penyebab dari masih banyaknya tempat tinggal yang tidak layak di Indonesia adalah karena masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia saat ini masih cukup besar, yang menyebabkan masih banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Rumah Tidak Layak Huni didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”).

Rumah layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Setiap orang butuh tempat tinggal yang nyaman dan mampu memberikan perlindungan maksimal, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR terus berupaya menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat melalui berbagai program pemerintah dan fasilitas pembiayaan perumahan, salah satunya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah RTLH di Indonesia salah satunya adalah dengan membuat program bedah rumah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai visi terwujudnya pemukiman yang layak produktif, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, diantaranya dengan melalui program bantuan bedah rumah atau PRTLH (Program Rumah Tidak Layak Huni) yang rutin diadakan tiap tahun. Program bantuan bedah rumah atau PRTLH harus diberikan kepada penerima yang layak dan pantas untuk mendapatkannya. Implementasi atau pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 438 tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan perkotaan Kabupaten Deli Serdang. Peran bidang perumahan dalam pelaksanaan ini yaitu mencari data valid terhadap rumah yang akan di bedah. Program ini bertujuan, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang mendapatkan program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah

adalah kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang cukup lama dan dapat menimbulkan budaya miskin.

KAJIAN TEORI

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2). (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman). Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Suatu perumahan dapat menciptakan suatu lingkungan hidup baru yang didalamnya mendapat rasa kebersamaan, hubungan antara individu yang erat, tanggung jawab dan kesamaan tujuan. Sebuah lingkungan perumahan merupakan tempat dimana tiap individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki *sense of belonging* atas lingkungan tempat tinggalnya (Charles Abrams, 1964). Untuk melakukan interaksi tersebut perlu ditunjang dengan adanya kondisi perumahan yang baik, salah satunya dengan pembangunan perumahan yang seimbang antara luas lahan dengan kebutuhan ruang dan kepadatan penduduk.

Maka dari itu diperlukan pengaturan atas perumahan yang layak huni yaitu dengan dibentuknya bidang perumahan oleh Dinas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan. Bidang perumahan adalah sebuah Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan, pengembangan dan pengelolaan sanitasi. Dari uraian di atas, maka termasuklah salah satu tugas dari bidang perumahan adalah menjalankan program Bantuan Stimulun Perumahan Swadaya (BSPS) atau sering disebut Program bedah rumah. Pada dasarnya pembangunan perumahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Pemerintah memiliki program bedah rumah, di mana rumah tak layak huni menjadi layak huni, atau membangun rumah baru yang layak huni. Salah satunya lewat bantuan rumah swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal dengan bantuan bedah rumah. BSPS merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (PRTLH) atau Bedah Rumah adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang yang tidak mampu guna mengurangi beban ekonomi. Bantuan ini bisa diperoleh jika calon penerima bantuan memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan. Program bantuan bedah rumah atau PRTLH harus diberikan kepada penerima yang layak dan pantas untuk mendapatkannya. (Muhammad, A., S., Andi, T., & Masnawati(2017).

Dalam melaksanakan program bedah rumah, bantuan ini tidak diberikan secara tunai, tetapi bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan. Adapun Syarat penerima bantuan Program Bedah Rumah menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah, atau yang dikenal Bedah Rumah BAB IV pasal 13 yaitu sebagai berikut:

Perseorangan penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
- b. Memiliki atau menguasai tanah.
- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak.
- d. Belum pernah memperoleh BPS dari pemerintah pusat.
- e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat.
- f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
- g. Bersedia membentuk kelompok, dan
- h. Bersedia membuat pernyataan.

Bedah rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah dan bagian dari Pembangunan Nasional. Dimana Tujuan Pembangunan Nasional merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan (Afifudin, 2012).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitiannya ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana studi ini memusatkan perhatian pada masalah/ fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, yang bersifat aktual, yang kemudian digambarkan realita yang jelas dan bertujuan untuk mengetahui secara terperinci tentang bagaimana Peran Bidang Perumahan Dalam Bantuan Stimulun Perusahaan Swadaya atau Program Bedah Rumah di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Jenis sumber data yang digunakan penulis yaitu data pokok yang diperoleh oleh penulis dari melakukan pengamatan langsung pada perusahaan dalam kegiatan Internship(Magang) di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang . Kemudian data pendukung dalam penulisan yang diperoleh dari buku-buku, internet, perpustakaan dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan magang di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang berlangsung selama 1 bulan , penulis ditempatkan pada Bidang Perumahan. Kegiatan Penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (magang) pada bidang perumahan yaitu menggunakan Sistem aplikasi yang namanya Boyongrani (Bangun Gotong Royong Rumah Tidak Layak Huni).Boyongrani yaitu sebuah sistem dimana data data rumah yang tidak layak huni dimasukkan kedalam aplikasi tersebut yang untuk kemudian berikutnya di analisis kebenaran datanya dan di survey kelapangan.setelah hasil survey dan data lapangan cocok kemudian data tersebut bisa jadi acuan salah satu pilihan rumah yang akan mendapatkan program Bantuan Stimulun Perumahan Swadaya atau Program Bedah Rumah.

Berdasarkan hasil lapangan,disini penulis ikut terjun kelapangan dan mengikuti Proses dalam pengambilan data data rumah tidak layak huni yaitu melalui dengan diawali mendatangi kepada kepala RT Dari setiap kepala dusun yang sudah di bagi bagi tugas tempat terjun lapangannya.Kemudian bersama kepala RT mendatengin dan mengecek bersama sama fisik dari rumah warganya yang dianggap sudah tidak layak huni dan harus benar benar mendapatkan bantuan bedah rumah.kemudian data tersebutlah yang dilaporkan dan dimasukkan kedalam aplikasi Boyongrani.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan rumah untuk tinggal dengan nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran air hujan, dan debu. Namun, karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang khususnya warga berpenghasilan rendah yang

tidak mampu membangun rumah yang layak huni. Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah untuk memberdayakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang disini mengelola anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang dimana anggaran ini berasal dari Kementerian PUPR sedangkan anggaran program bedah rumah yang berasal dari anggaran Reguler dikelola oleh Satker Provinsi dan anggaran BSPS strategis di kelola oleh Satker Pusat. Dan disini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang disini hanya bertindak sebagai pengawas pelaksanaan program bedah rumah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Tidak hanya sebagai pengawas, namun bidang perumahan juga berperan sebagai pemberi bahan material/bangunan yang diserahkan kepada warga yang rumahnya akan di bedah dan data nya sudah terverifikasi. Peran bidang perumahan bukan hanya sekedar memberi dana melainkan bidang ini yang menyiapkan material apa saja yang di butuhkan untuk proses pembedahannya sampai selesai.

KESIMPULAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai visi terwujudnya pemukiman yang layak produktif, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, diantaranya dengan melalui program bantuan bedah rumah atau PRTLH (Program Rumah Tidak Layak Huni) yang rutin diadakan tiap tahun. Implementasi atau pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 438 tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan perkotaan Kabupaten Deli Serdang.

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang disini mengelola anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang dimana anggaran ini berasal dari Kementerian PUPR sedangkan anggaran program bedah rumah yang berasal dari anggaran Reguler dikelola oleh Satker Provinsi dan anggaran BSPS strategis di kelolah oleh Satker Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 /PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya.
- Materi diklat Penyelenggaraan Rumah Swadaya “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Cover : <https://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/wp-content/uploads/2019/05/renovasi-rumah-485x375.jpg>
- Muhammad, A., S., Andi, T., & Masnawati(2017). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Program Bantuan Daerah Menggunakan Weight Product. Jurnal Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
- Afifudin.2012.Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep,Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi.Bandung, Alfabeta
- Kristiana Widiawati, “Indikator Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah” :Jurnal Widya Praja, Vol. 2 No. 1 (2022)